

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan karakter merupakan arena untuk melakukan sebuah proses perubahan dan kedewasaan, terutama untuk membangkitkan generasi penerus yang memiliki sifat ideal, berkualitas dan berkarakter sesuai landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Goleman (2008) menyatakan betapa kepribadian manusia mendominasi 80 persen dari kehidupan seseorang, dibanding dengan 20 persen kecerdasan otaknya semata-mata. Artinya bahwa betapa pun sebuah kemajuan dicapai, dapat menjadi perusak bila tidak dibekali dengan perimbangan karakter yang di dalamnya menggabungkan kaidah-kaidah etika, moral dan agama (Yuliana, 2010). Bangsa dan negara maju bukan karena memiliki pemimpin yang baik, memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan bukan karena umur sebuah negara atau lamanya merdeka tetapi disebabkan karakter yang baik dimiliki oleh bangsa tersebut. oleh karena itu, tanpa adanya karakter yang baik suatu bangsa, maka tujuan pendirian suatu negara akan tidak akan berhasil.

Pendidikan karakter juga merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 yaitu Pendidikan adalah

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Maksud dan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa proses pembelajaran tidak menekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan saja atau mengembangkan potensi yang dimiliki si peserta didik tapi juga menekankan pada pembentukan karakter yang baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Lickona karakter berhubungan dengan konsep moral, sikap moral dan perilaku moral. Maksud dari 3 komponen tersebut yaitu karakter baik di dorong oleh pengetahuan kebaikan, mendambakan untuk berbuat kebaikan serta melakukan perbuatan baik. (Maisaro, Atik Wiyono, Bambang Budi Arifin, 2018).

Perkembangan zaman telah menghilangkan akar dari pendidikan Indonesia yaitu budaya bangsa itu sendiri. Banyak peserta didik melakukan tindakan menyimpang seperti bullying, tawuran, pelecehan seksual, kekerasan, menggunakan narkoba, sex bebas dan tutur kata yang kasar atau tidak sopan yang diucapkan dalam sehari-hari. Kasus tersebut sudah dilakukan cukup lama

dengan berbagai macam bentuk. Menurut data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (Waradewa, 2020), ada banyak kasus bentuk kenakalan remaja yang kini terjadi, seperti tertuang pada table berikut:

Tabel I.1 Data kasus Kenakalan

Bentuk Kasus	Tahun					Jumlah
	2016	2017	2018	2019	2020	
Anak Pelaku tawuran Pelajar	76	74	88	84	2	324
Anak Pelaku Kekerasan di Sekolah (<i>bullying</i>)	181	116	127	51	6	481
Anak yang menggunakan narkotika	96	46	63	52	6	263
Anak yang menjual narkotika	31	31	15	6	1	84
Anak sebagai pelaku tindak kejahatan melalui seksual online	188	142	134	148	39	651

Sumber Data KPAI 2020

Maraknya kasus diatas membuktikan bahwa kurangnya pendidikan karakter di Indonesia, hal tersebut harus memperbaiki atau memperkuat pembentukan pendidikan karakter. Peran pemerintah sangat penting untuk membentuk karakter yang lebih baik lagi melalui satuan pendidikan. Menurut Ali Miftakhu Rosyad mengatakan bahawa lingkungan pendidikan adalah suatu tempat dimana proses nilai-nilai pembelajaran berlangsung dalam jangka waktu dan tempat tertentu (Rosyad, 2019). Cara memperbaiki pembentukan karakter bisa melalui mengimplementasikan pendidikan karakter dalam

kegiatan sekolah. Menurut Riyanto (2010), Dalam rangka mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah terdapat empat tawaran model penerapan, yaitu : a) Model otonomi dengan menempatkan pendidikan karakter sebagai mata pelajaran tersendiri, b) Model integrasi dengan menyatukan nilai-nilai dan karakter-karakter yang akan dibentuk dalam setiap mata pelajaran, c) Model ekstrakurikuler melalui sebuah kegiatan tambahan yang berorientasi pembinaan karakter siswa, d) Model kolaborasi dengan menggabungkan ketiga model tersebut dalam seluruh kegiatan sekolah (Dalyono & Enny Dwi Lestariningsih, 2017).

Untuk mewujudkan pembangunan karakter yang di amanatkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 maka pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas. Pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 87 Tahun 2017 mengenai Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), dimana penguatan pendidikan karakter menempati posisi fundamental dan strategis pada saat pemerintah revolusi karakter bangsa tercantum dalam nawacita (Nawacita 8), menggelorakan Gerakan Nasional Revolusi Mental, dan menerbitkan RPJMN 2014- 2019 berlandaskan Nawacita. Gerakan ppk diartikan sebagai Gerakan revolusi mental sekaligus bagian integral Nawacita (Ir. Hendarman, M.Sc. et al., 2018).

Peraturan”Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 1 tentang penguatan pendidikan karakter yang berisikan “Penguatan Pendidikan Karakter

yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)” (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, 2017).

Berdasarkan Perpres No 87 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 1 mengenai penguatan pendidikan karakter bahwa memperkuat pendidikan karakter melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga hal tersebut cikal bakal 5 nilai utama dalam penguatan pendidikan karakter. Menurut web resmi Kemendikbud 5 nilai utama penguatan pendidikan karakter meliputi nilai religius, nilai nasionalisme, nilai integritas, nilai mandiri, dan nilai gotong royong (“Penguatan Pendidikan Karakter Jadi Pintu Masuk Pembinaan Pendidikan Nasional,” 2017). Berdasarkan Perpres no 87 Tahun 2017 pasal 4 ruang lingkup dalam penguatan pendidikan karakter meliputi pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal meliputi sekolah dasar sampai perguruan tinggi, pendidikan nonformal meliputi taman pendidikan Al-Quran, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan, sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang terbentuk secara mandiri.

Salah satu program prioritas pemerintah mengenai penguatan pendidikan karakter maka pemerintah bekerja sama dengan satuan pendidikan untuk menjalankan program tersebut. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 97 Jakarta telah menjalankan program penguatan pendidikan karakter dari tahun 2018. Ketika peneliti melakukan wawancara kepada Drs Ruslan sebagai guru SMAN 97 Jakarta dan selaku wakil kepala sekolah bidang Kesiswaan untuk mengetahui sejauh mana program penguatan pendidikan karakter di SMAN 97 Jakarta berjalan. Beliau mengatakan bahwa beberapa kegiatan penguatan program pendidikan karakter di SMAN 97 telah berjalan semenjak tahun 2018, seperti pengintegrasian materi pembelajaran dan pelaksanaan kegiatan penunjang program.

Permasalahan yang selalu dihadapi sekolah mengenai pendidikan karakter yaitu mengenai kedisiplinan. Rata-rata siswa yang melanggar tata tertib mengenai kedisiplinan per bulan adalah 19 orang. Mulai dari tidak datang tepat waktu, ketidaklengkapan atribut sekolah menyontek, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu dan tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dimana dalam tata tertib sekolah sudah dijelaskan bahwa peserta didik wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Hal yang dilakukan peserta didik belum mencerminkan 5 nilai utama program penguatan pendidikan karakter yaitu nilai integritas, nilai nasionalisme dan nilai kemandirian. Hal tersebut ada kekurangan dalam melaksanakan program penguatan pendidikan karakter, oleh

sebab itu harus melakukan evaluasi dalam melaksanakan program penguatan pendidikan karakter.

Program pengembangan karakter peserta didik akan terlaksana dengan baik bila sekolah membuat RK (Rencana Kegiatan) dengan benar dan sekolah juga wajib mengevaluasi dari kegiatan tersebut. Melakukan sebuah evaluasi yang sifatnya berkelanjutan dari waktu ke waktu maka program penguatan pendidikan karakter semakin bermutu. Dari hasil evaluasi maka dapat melakukan perbaikan, pengembangan, dan meningkatkan program penguatan pendidikan karakter sehingga sesuai dengan harapan dan tujuan pelaksanaan program.

Evaluasi dengan menggunakan model CIPP yang dikembangkan oleh L. Stufflebeam, dikembangkan di Ohio State University. Menurut Stufflebeam dan Shinkfield (1985) dalam Marhaeni (2007), model evaluasi menggunakan CIPP (Context, Input, Process, Product) dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam empat macam bentuk keputusan, yaitu: (1) perencanaan (yang berpengaruh terhadap pemilihan tujuan dan sasaran kegiatan), (2) strukturisasi (yang menentukan strategi optimal dan rancang bangun prosedur dalam mencapai tujuan), (3) implementasi (yang menyediakan alat untuk pelaksanaan program dan perbaikan program yang telah ada), dan (4) daur ulang (menentukan apakah suatu kegiatan perlu dilanjutkan atau diubah atau dihentikan). Untuk mencapai ke empat tujuan ini, model CIPP

mengevaluasi empat macam unsur, yaitu: (1) konteks (2) input, (3) proses, dan (4) produk dari suatu kegiatan (Kadek et al., 2017).

Berdasarkan pemaparan diatas program PPK sudah terlaksana dengan baik, tetapi permasalahan selalu muncul mengenai permasalahan pererta didik mengenai nilai integritas, nasionalisme dan kemandirian. Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk mengkaji permasalahan lebih dalam mengenai program penguatan pendidikan karakter di SMAN 97 Jakarta melalui judul “Evaluasi Program Penguatan Pendidikan Karakter di SMAN 97 Jakarta”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dalam pembentukan karakter dalam sebuah program karakter disekolah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan dan kebutuhan dari program penguatan pendidikan karakter terdiri dari profil pendidikan karakter dan analisis kebutuhan di SMAN 97 Jakarta sebagai tahapan context (konteks)?
2. Bagaimana kesiapan dalam melaksanakan program penguatan pendidikan karakter terdiri dari kepala sekolah, program pendidikan karakter, guru atau pendidik, kurikulum, sarana prasarana, dan pembiayaan di SMAN 97 Jakarta sebagai tahapan input (masukan)?

3. Bagaimana pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter dalam kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan pengawasan atau supervisi sebagai tahapan proses (*process*) di SMAN 97 Jakarta?
4. Bagaimana hasil dari program penguatan pendidikan karakter dalam internalisasi, prestasi akademik dan non akademik sudah tercapai oleh peserta didik dan guru sebagai tahapan produk (*product*) di SMAN 97 Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah peneliti rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui evaluasi *context* yaitu kesesuaian landasan program penguatan pendidikan karakter dengan tujuan penguatan pendidikan karakter.
2. Mengetahui evaluasi *input* yaitu kesiapan dalam melaksanakan program penguatan pendidikan karakter berkaitan dengan kepala sekolah, guru atau pendidik, kurikulum, sarana prasarana dan pembiayaan.
3. Mengetahui evaluasi *process* yaitu mengetahui pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter dalam kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan pengawasan atau supervisi.
4. Mengetahui evaluasi *product* yaitu hasil dari program penguatan pendidikan karakter dalam internalisasi, prestasi akademik dan non akademik sudah tercapai oleh peserta didik dan guru.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara teoritis dan praktis memiliki manfaat dalam bidang pendidikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan dan menambahkan ilmu pengetahuan serta wawasan tentang penguatan pendidikan karakter yang di laksanakan di SMAN 97 Jakarta dan dapat mengetahui sejauh mana hasil dari pendidikan karakter saat pembelajaran jarak jauh tercapai bagi peserta didik.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat berguna sebagai bacaan untuk memperoleh informasi atau ilmu pengetahuan tambahan bagi masyarakat yang berminat mendalami masalah program penguatan pendidikan sekolah menengah atas di DKI Jakarta

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk mengembangkan program penguatan pendidikan karakter atau menjadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan penguatan pendidikan karakter.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai program pemerintah di bidang pendidikan karakter. Serta penelitian ini berguna sebagai syarat mahasiswa untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

d. Bagi Fakultas Ekonomi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa Pendidikan Ekonomi dan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

